



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI  
DALAM RANGKA  
PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM *FOOD ESTATE* BERBASIS  
HORTIKULTURA  
DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2020-2021  
25-27 MARET 2021**

\*

\*\*

\*\*\*

\*\*

\*

**JAKARTA 2021**



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI  
DALAM RANGKA  
PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM *FOOD ESTATE* BERBASIS  
HORTIKULTURA  
DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2020-2021  
25 S.D. 27 MARET 2021**

**A. DASAR HUKUM**

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI dalam rangka pengawasan pelaksanaan program *food estate* berbasis hortikultura di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Tata Tertib:
  - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
  - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 19 Januari 2021.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 10 Maret 2021.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI, untuk mengetahui secara mendalam sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan *food estate* berbasis hortikultura di Kabupaten Humbang Hasundutan,

Provinsi Sumatera Utara. Tim Komisi IV DPR RI juga ingin menggali informasi serta mendiskusikan hal-hal yang menjadi permasalahan, serta upaya penyelesaiannya berkaitan terkait kegiatan *food estate* ini.

### **C. TIM KUNJUNGAN KERJA**

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI dipimpin oleh H. Dedi Mulyadi, S.H. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG), dengan susunan tim sebagaimana terlampir.

### **D. WAKTU DAN LOKASI KUNJUNGAN KERJA**

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan tanggal 25-27 Maret 2021.

### **E. OBJEK KUNJUNGAN KERJA**

Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan ke lokasi *food estate* hortikultura, Desa Ria-Ria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pengawasan pelaksanaan kegiatan *food estate* yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2020 dengan anggaran Rp46.335.491.000,00 dan sebesar Rp12.000.000.000,00 di tahun 2021. Dalam kunjungan ini, Tim Komisi IV DPR RI meninjau lokasi kegiatan *food estate*, melakukan panen simbolis, dan melakukan uji petik terhadap komoditas bawang merah untuk mengetahui kualitas yang dihasilkan. Selain itu, tim Komisi IV DPR RI juga melakukan diskusi dengan Pemerintah, petani, serta stakeholder terkait lainnya. Berdasarkan pertemuan, Komisi IV DPR RI mendapatkan gambaran terkait pelaksanaan *food estate* tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi.

### **F. GAMBARAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) merupakan sebuah kabupaten di Sumatera Utara, yang dibentuk pada 28 Juli 2003. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 2.335,33 km<sup>2</sup> dimana Dolok Sanggul sebagai ibukota kabupatennya. Kondisi fisik kabupaten ini berada pada

ketinggian 330-2.075 meter dpl. Menurut data tahun Sensus Penduduk 2010 penduduknya berjumlah 171.650 jiwa, dan diakhir tahun 2019, penduduknya berjumlah 190.186 jiwa. Secara geografis, kabupaten ini terletak antara 2°13'–2°28' Lintang Utara dan 98°10'–98°57' Bujur Timur.

### Batas wilayah

Utara	Kabupaten Samosir
Timur	Kabupaten Tapanuli Utara
Selatan	Kabupaten Tapanuli Tengah
Barat	Kabupaten Pakpak Bharat

Secara topografi, wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki sifat muka tanah bergelombang dan berbukit dengan ketinggian antara 330–2075 mdpl. Kemiringan tanah di wilayah ini terbagi menjadi tiga, yaitu datar dengan persentase 11% dari luas wilayah keseluruhan Kabupaten Humbang Hasundutan, landai dengan persentase 20% dari luas wilayah keseluruhan Kabupaten Humbang Hasundutan, dan miring/terjal sebesar 69% dari luas wilayah keseluruhan Kabupaten Humbang Hasundutan. Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan, 153 (seratus lima puluh tiga) Desa dan 1 (satu) Kelurahan, yaitu Kecamatan Pakkat, Kecamatan Onanganjang, Kecamatan Sijamapolang, Kecamatan Lintongnihuta, Kecamatan Paranginan, Kecamatan Doloksanggul, Kecamatan Pollung, Kecamatan Parlilitan, Kecamatan Tarabintang dan Kecamatan Baktiraja. Secara mendetil dapat dilihat pada perincian dibawah ini:

### Luas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Menurut Kecamatan

NO	NAMA KECAMATAN	LUAS(Ha)
1	Pakkat	38.168,00
2	Onanganjang	22.256,27
3	Sijamapolang	14.018,07
4	Lintongnihuta	18.126,03
5	Paranginan	4.778,06
6	Doloksanggul	20.929,53
7	Pollung	32.736,46
8	Parlilitan	72.774,71
9	Tarabintang	24.251,98
10	Baktiraja +Luas Danau Toba	2.231,91 + 1.494,91

**Humbang Hasundutan**

251.765,93

Sumber: Surat Edaran Bupati Humbang Hasundutan Nomor: 130/1647/Pem/XI/2007, 12 November 2007

Adapun jumlah desa per kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah Desa
1.	Pakkat	22
2.	Onan Ganjang	12
3.	Sijamapolang	10
4.	Doloksanggul	27 + 1 Kelurahan
5.	Lintongnihuta	22
6.	Paranginan	11
7.	Baktiraja	7
8.	Pollung	13
9.	Parlilitan	20
10.	Tarabintang	9
<b>Total</b>		153 Desa + 1 Kelurahan

Mayoritas penduduk Humbang Hasundutan adalah petani. Komoditas pertanian terbesar adalah kopi dengan luas panen 9.246 Ha dan produksi 6.461 ton (Humbahas Dalam Angka 2007). Perkebunan kopi terdiri dari 48,45% luas lahan pertanian dan perkebunan. Selain kopi, kabupaten ini juga kaya dengan kemenyan. Dengan luas panen 5.235 Ha menghasilkan 1.278 ton. Luas lahan kemenyan mencapai 23,16%. Komoditas lainnya adalah karet, kulit manis, kemikir, coklat, kelapa sawit, aren, kelapa, tebu, jahe, cengkih, dan andaliman.

Komoditas pertanian andalan penduduk adalah cabe dengan luas panen 612 Ha menghasilkan 3.086 ton (Humbahas Dalam Angka 2007). Tanaman cabe mencapai 39,97% lahan pertanian. Selain cabe penduduk juga bertanam andaliman, kubis, tomat, kentang, sawi, wortel, dan bawang merah. Adapun di bidang kehutanan, kabupaten Humbang Hasundutan memiliki lahan 159.392 Ha hutan terdiri dari hutan produksi 84.540 Ha; hutan lindung 74.852 Ha. Kawasan hutan terbesar berada di kecamatan Parlilitan yakni 38,58% dari hutan yang ada di kabupaten ini.

Potensi ekonomi lain di kabupaten Humbang Hasundutan adalah pembangkit listrik. Terdapat 10 lokasi air terjun yang dapat dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik. Air terjun dengan ketinggian jatuh tertinggi adalah

Aek Sipang dengan ketinggian 125 meter. Berikutnya adalah Sipulak (75 m), Sisira (75 m), Simarhilang (50 m), dan lain-lain. Sebanyak 4 air terjun ini berada di satu desa yakni Sijarango (Janjimatogu), kecamatan Pakkat.

## **G. FOOD ESTATE HORTIKULTURA DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

*Food Estate* Sumatera Utara telah dimulai pelaksanaannya sejak bulan Agustus 2020. Untuk Tahun Anggaran 2020, Kementerian Pertanian mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) senilai total Rp46.335.491.000,00. Anggaran tersebut dilaksanakan oleh 4 (empat) eselon I lingkup Kementerian Pertanian, yaitu Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Badan Pengembangan SDM sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam rangka pengembangan *food estate* seluas 225 hektar. Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi berperan sebagai koordinator antar-K/L terkait *food estate* Sumatera Utara, meliputi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, serta Kementerian BUMN.

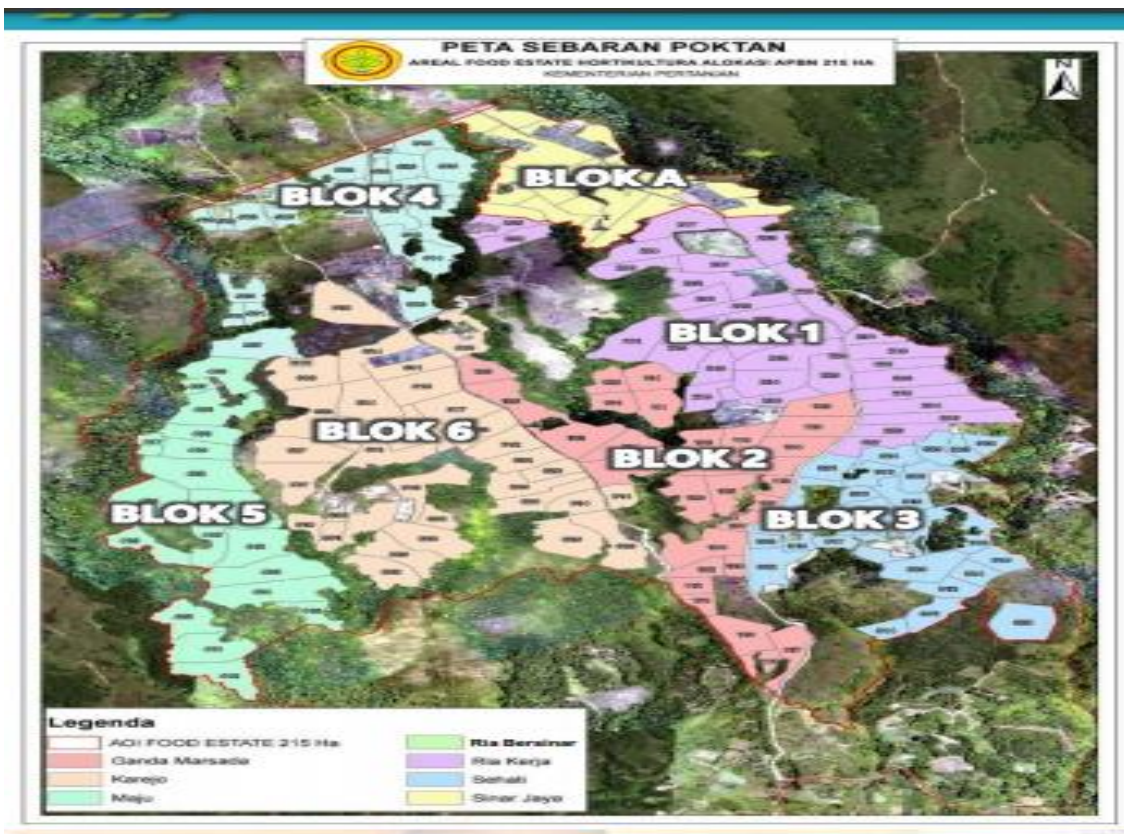
Fokus pengembangan *food estate* Sumatera Utara adalah komoditas hortikultura dataran tinggi, diantaranya kentang industri, Bawang Merah, dan Bawang Putih yang bertujuan meningkatkan ketersediaan produk di dalam negeri serta sebagai substitusi impor. Tahun 2020 telah dilaksanakan pengembangan kawasan seluas 225 hektar, yang terdiri dari 215 hektar dalam satu hamparan di Desa Ria-Ria, Kecamatan Pollung Kabupaten Humbahas, dimana untuk pengembangan bawang merah 105 hektar, bawang putih 55 hektar dan kentang 55 hektar), serta 10 hektar (bawang merah 3 hektar, bawang putih 3 hektar, dan kentang 4 hektar) di Kebun Percobaan Litbang Pertanian, Gur-Gur Kabupaten Toba Samosir.

*Area of Interest* (Aoi) pengembangan *food estate* Sumatera Utara ditargetkan mencapai 60.961 hektar dengan lahan yang siap digunakan seluas 12.790 hektar dengan status Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK), mencakup 4 (empat) kabupaten, yaitu Kabupaten Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Tengah. Tahun 2021 akan

difokuskan pada penyelesaian pengembangan seluas 1.000 hektar di Kabupaten Humbang Hasundutan, dimana 785 hektar diantaranya akan dikelola oleh investor/pelaku usaha swasta. Status lahan di area 1.000 hektar tersebut adalah Area Penggunaan Lainnya (APL) yang secara adat dimiliki oleh masyarakat setempat.

Capaian hingga per Januari 2021, telah terlaksana pengembangan kawasan seluas 200 hektar oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dan 25 hektar demfarm oleh Badan Penelitian dan Pengembangan; perluasan lahan 200 hektar oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; serta rintisan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) sebagai penggerak korporasi petani yang diinisiasi oleh Badan Pengembangan SDM Pertanian. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR telah membangun sarana jaringan irigasi untuk mengairi area lebih dari 50 hektar. PT PLN sudah mulai membangun jaringan listrik di kawasan.

Kendala lapang yang dihadapi antara lain, aksesibilitas jalan terutama kerusakan jalan di dalam kawasan, sehingga menghambat distribusi sarana produksi dan tenaga kerja, keterbatasan SDM petani hortikultura, serta cuaca ekstrim yang memicu kerusakan tanaman dan serangan penyakit. Upaya tindak lanjut yang dilakukan antara lain, koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk penyelesaian target 1.000 hektar pada tahun 2021, meliputi aspek infrastruktur dasar (jalan, irigasi, listrik), aspek perluasan lahan, aspek teknologi dan budi daya, serta kelembagaan ekonomi petani (korporasi petani).



Lokasi Pengembangan 2020, dibagi beberapa zonasi di blok tanam lokasi Ria Ria, yaitu Blok 1,2,3 merupakan kawasan Bawang Merah 100 Ha, Blok 4,5 merupakan kawasan Bawang Putih 50 Ha, Blok 6 merupakan kawasan Kentang Industri 50 Ha, Blok A demfarm 15 Ha untuk komoditas bawang merah, bawang putih, dan kentang. Jumlah CPCL 168 petani. Kemudian terdapat demfarm Litbang di Kebun Percobaan Gur Gur 10 Ha. Panen perdana bawang merah pada tanggal 9 Maret 2020 diperkirakan seluas 16 ha dan melibatkan offtaker dalam penyerapan hasil panennya.

Adapun progress Kawasan seluas 215 adalah sebagai berikut:

PROGRESS KAWASAN 215 HEKTAR (s/d 20 Maret 2021)						
Komoditas	Blok	Kelompok	Lahan terolah (hektar)	Tertanam (hektar)	Panen (hektar)	Produksi Sudah Ditimbang (Kg)
Bawang Merah	I	Ria Kerja	43	43	5,56	22.205
	II	Ganda Marsada	32	32	10,4	15.511
	III	Sehati	25	25	11,8	13.488
Bawang Putih	IV	Ria Bersinar	19	19	0	-
	V	Maju	31	31	0	-
Kentang	VI	Karejo	50	50	0	-
Demfarm	VII	Sinar Jaya				
		-Bawang Merah	5	5	4	13.250
		-Kentang	5	5	2	15.000
		-Bawang Putih	5	5	0	-
		<b>Jumlah</b>		<b>215</b>	<b>215</b>	<b>33,76</b>

Keterangan:  
- Timbangan bawang merah rata-rata dalam bentuk konde kering panen  
- Kentang yg sudah dipanen varietas Median (Gnol 1 ha, G2 1 Ha)



Sementara itu, progres panen kentang demfarm per 21 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

Kriteria	Produksi (Kg)	Harga Jual/Kg (Rp)	Total Penjualan (Rp)
- G0 Ukuran Besar (Industri)	3.500	6.200	21.700.000
- G0 Ukuran Kecil (Benih)	3.500	10.000	35.000.000
- G2 (Konsumsi)	8.000	6.200	49.600.000
<b>Total</b>	<b>15.000</b>		<b>106.300.000</b>

Kendala dan permasalahan di area penanaman kentang, Kerusakan aksesibilitas jalan di dalam kawasan, dan Sarana irigasi belum optimal menjangkau seluruh wilayah. Kemudian, prediksi/proyeksi panen bawang merah FE Sumatera Utara tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Komoditas	Luas Areal (Ha)	Provitas (Ton/Ha)		Perkiraan Produksi (Ton)	Harga Jual Per Kg (Rp)	Potensi Nilai Penjualan (Rp)
		Konde Basah	Rogol Kering			
- Grade A	28.4	24.6	9.8	279.5	18,000	5,030,208,000
- Grade B	39.0	10.6	4.2	165.4	15,000	2,480,400,000
- Grade C	32.6	7.2	2.9	93.9	13,000	1,220,544,000
<b>Total</b>	<b>100.0</b>			<b>538.7</b>		<b>8,731,152,000</b>

Keterangan:

- Ubinan dilakukan tanggal 10 Maret 2021 oleh Mantri Tani/PPL pada lokasi Bawang Merah Kelompok Tani Ria Kerja
- Harga Jual Rogol Kering 5 hari (kesepakatan dengan *offtaker*)

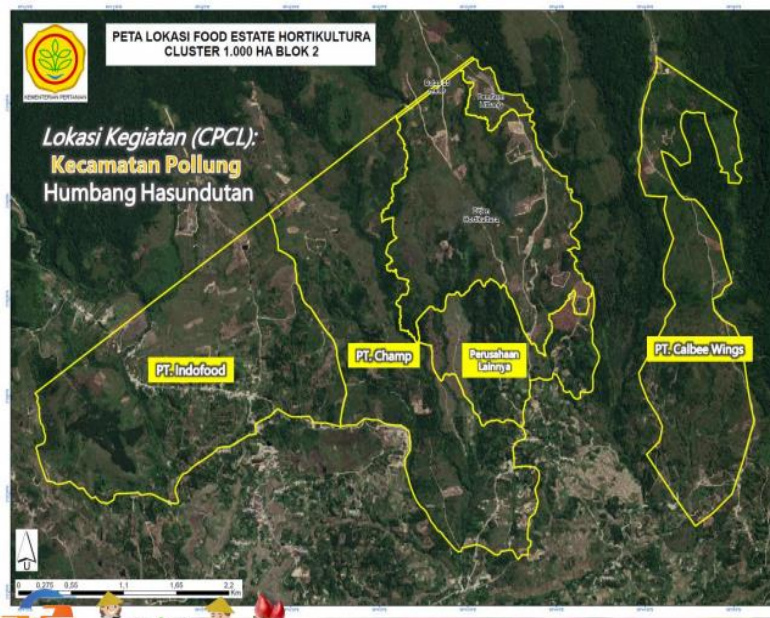


Kegiatan panen dan *replanting* akan dilaksanakan pada periode bulan Maret hingga Mei, dimana salah satu lokasi panen ada di blok Karejo sebanyak 4,4 Ha dengan 100 orang pekerja, dengan pihak *offtaker* adalah PT Indofood dan PT Champ. Adapun teknis pengubinan melalui sampling ubinan yang dilaksanakan oleh pihak BPP Pollung. *Replanting* rencananya akan dilaksanakan bulan Maret-Mei 2021 dengan *offtaker* PT Indofood dimana seluas 3 Ha ditanam oleh PT Indofood (Tanam bulan Maret 2021), dan seluas 27 Ha dengan skema kerjasama berupa peminjaman benih dengan PT Indofood. Untuk pola tanam Musim Tanam II *Food Estate* Sumatera Utara direkomendasikan menggunakan pola:



Secara keseluruhan, akan dikembangkan klaster FE Sumatera Utara seluas 1000 hektar dengan perincian:

No	APBN	Ha
1.	Demfarm	15
2.	Pengembangan Kawasan & Perbenihan	200
<b>JUMLAH</b>		<b>215</b>
No	INVESTOR	Ha
1.	Calbee wings	200
2.	Champ	200
3.	Indofood	300
4.	Eden farm	20
5.	EWINDO	20
6.	Pamaraya	25
7.	PT. Karya Tani Semesta	5
8.	PT. Semangat Tani	5
9.	PT. Agra Garlica	5
10.	PT. Agri Indo Sejahtera	5
<b>JUMLAH</b>		<b>785</b>



### Rencana Tindak Lanjut FE Sumatera Utara:

Restrukturisasi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP), melalui Penyusunan Struktur Organisasi Kelompok Usaha Bersama (KUB), dan Pengawasan dan Pendampingan Pembentukan KUB hingga mandiri. Pengelolaan keuangan dan asset FE, melalui Pengelolaan (pencatatan) hasil panen dan hasil penjualan, Pembentukan Rekening Bersama dan Optimalisasi penggunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR); dan pemeliharaan tanaman secara intensif melalui Penambahan nutrisi organik & anorganik, Detasering dosen, peneliti & mahasiswa untuk mengawal & mendampingi petani, Percepatan Pelaksanaan Padat Karya (Tenaga Kerja).

## Rancangan ABT FE Sumut 2021 sebesar Rp35,6 Miliar

No.	JENIS KEGIATAN	USULAN TAMBAHAN ANGGARAN			
		Volume	Satuan	Unit Cost (Rp)	Anggaran (Rp.)
<b>TOTAL KEBUTUHAN</b>					<b>35.601.250.000</b>
<b>I</b>	<b>ASPEK HORTIKULTURA</b>	<b>215</b>	<b>Ha</b>		<b>23.995.000.000</b>
<b>A</b>	<b>FASILITASI SARANA PRODUKSI/BUDIDAYA</b>				<b>12.400.000.000</b>
	- Kab. Humbang Hasundutan	215	Ha		12.400.000.000
	Bawang Merah	50	ha	50.000.000	2.500.000.000
	Bawang Putih	25	ha	50.000.000	1.250.000.000
	Kentang	140	ha	50.000.000	7.000.000.000
	Benih Jeruk	20.000	btg	19.000	380.000.000
	Benih Alpukat	7.500	btg	26.000	195.000.000
	Money	1	Keg	1.075.000.000	1.075.000.000
<b>B</b>	<b>SARANA PRASARANA</b>				<b>8.005.000.000</b>
	Gapura Food Estate	1	unit	100.000.000	100.000.000
	Saung Tani	6	unit	15.000.000	90.000.000
	Bangsai Pascapanen & kelengkapan	3	unit	1.000.000.000	3.000.000.000
	Gudang Benih & kelengkapan	3	unit	1.000.000.000	3.000.000.000
	Drone Sprayer	2	unit	100.000.000	200.000.000
	Soil & Water Sensor	3	unit	25.000.000	75.000.000
	Mesin Pipil Bawang Putih	2	unit	25.000.000	50.000.000
	Mesin Tanam Bawang Putih	2	unit	300.000.000	600.000.000
	Alat Implemen Bedeng	5	unit	30.000.000	150.000.000
	Alat Implemen Panen Kentang	5	unit	30.000.000	150.000.000
	Mesin Pemasang Mula	5	unit	30.000.000	150.000.000
	Money dan Pendukung lainnya	1	Keg	440.000.000	440.000.000
<b>C</b>	<b>SARANA PASCAPANEN</b>				<b>1.590.000.000</b>
	Motor Roda Tiga	10	unit	35.000.000	350.000.000
	Solar Dryer Dome	2	unit	500.000.000	1.000.000.000
	Money dan Pendukung lainnya	1	Keg	240.000.000	240.000.000
<b>D</b>	<b>SINKRONISASI, KOORDINASI DAN PENDAMPINGAN FOOD ESTATE</b>				<b>2.000.000.000</b>
		1	Keg	2.000.000.000	2.000.000.000
<b>II</b>	<b>ASPEK PRASARANA DAN SARANA</b>				<b>2.700.000.000</b>
<b>A</b>	<b>JARINGAN IRIGASI</b>				<b>2.200.000.000</b>
	Embung Geomembrane (10 m x 10 m x 3 m)	12	Unit	100.000.000	1.200.000.000
	Jalan Usaha Tani	5	Km	200.000.000	1.000.000.000
<b>B</b>	<b>PENGAWASAN, DOKUMEN LINGKUNGAN DAN PENDUKUNG LAINNYA</b>				<b>500.000.000</b>
		1	Keg	500.000.000	500.000.000
<b>III</b>	<b>ASPEK LITBANG</b>				<b>8.462.500.000</b>
<b>A</b>	<b>Penataan Konservasi Tanah &amp; Air</b>				
	- Penanaman & Pemeliharaan Alpukat dan Jeruk (Lobang tanam, pupuk dasar, tanam, SPA, Rorak, Saluran Buntu)	27.500	btg	35.000	962.500.000
<b>B</b>	<b>Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi</b>				
		1	Keg	7.000.000.000	7.000.000.000
<b>IV</b>	<b>ASPEK SDM</b>				<b>443.750.000</b>
<b>A</b>	<b>Operasional BPP dan Kabupaten</b>				
		1	Keg	100.000.000	100.000.000
<b>B</b>	<b>Toolkit bagi Penyuluh Pertanian</b>				
		1	Keg	18.750.000	18.750.000
<b>C</b>	<b>Pengawasan dan Pendampingan Penyuluh</b>				
		1	Keg	150.000.000	150.000.000
<b>D</b>	<b>Pengawasan dan Pendampingan oleh Polbangtan</b>				
		1	Keg	100.000.000	100.000.000
<b>E</b>	<b>Pelatihan Penyuluh dan Petani</b>				
		1	Keg	75.000.000	75.000.000

**Total Usulan ABT Rp 35,6 Milyar**



Beberapa hal yang menjadi hal yang dikritisi oleh anggota Tim Komisi IV DPR RI antara lain, mengenai perhitungan nilai ekonomi, serta status lahan yang selain APL milik masyarakat adat, juga ada yang merupakan tanah negara yang digarap oleh masyarakat (petani). Poin yang dikritisi oleh Komisi IV DPR RI adalah, keberlanjutan terhadap program *food estate* tersebut, serta kekhawatiran tanah negara tersebut setelah akan dijual setelah masyarakat menggarap bekerja sama dengan swasta dan telah mendapatkan sertifikat. Meskipun telah dijelaskan, bahwa tanah negara tidak bisa diperjual belikan, namun tim Komisi IV DPR RI merencanakan akan melakukan rapat yang akan mengahdirkan ATR/BPN, serta rapat dengan pihak swasta/offtaker perusahaan yang terlibat di dalam program.

Hal lain yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana design infrastruktur irigasinya, yang kemudian dijelaskan bahwa PUPR sudah menyusun SID, DED untuk irigasi. Selain itu, akses menuju lokasi *food estate* juga dinilai menjadi masalah oleh Komisi IV DPR RI. Lebih lanjut lagi, Komisi IV DPR RI menilai bukan biaya yang menjadi masalah, namun lebih kepada pengelolaannya akibat lokasi yang sangat jauh. Hal ini terlihat berdasarkan uji petik, baru 40% yang terkelola dengan baik. Berdasarkan uji petik, Komisi IV DPR RI menilai

panen bawang merah memiliki hasil yang bagus, namun potensinya baru 50%. Hal ini dimaklumi, karena pelaksanaan baru tahun pertama, serta kondisi tanah masih asam, sehingga harus dilakukan intensifikasi dan penanaman harus dilakukan berulang agar gembur.

Selain itu, adanya kekhawatiran apakah kegiatan budi daya ini akan tetap diteruskan oleh masyarakat setelah 2 (dua) tahun status lahan dilepas oleh Pemerintah. Namun pada saat kunjungan, disampaikan oleh para petani bahwa berkomitmen untuk meneruskan program.

Selain itu Komisi IV DPR RI mempertanyakan kepada pemerintah daerah (dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang diwakili oleh Wakil Bupati Humbang Hasundutan), sejauhmana wewenang pemerintah daerah terhadap keterlibatannya dalam kegiatan *Food Estate*, dan mempertanyakan komitmen pemerintah daerah terhadap pengaspalan jalan menuju lokasi *food estate*. Terkait pengaspalan jalan, wakil bupati menyanggupi untuk menyelesaikannya di bulan Juli 2021.

## H. KESIMPULAN

1. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk memperhatikan kepemilikan lahan oleh masyarakat, dan memastikan lahan dimiliki oleh masyarakat setempat, serta meminta agar masyarakat jangan sampai dirugikan dengan adanya kegiatan *food estate* tersebut.
2. Komisi IV DPR RI menilai *Food Estate* di Humbang Hasundutan (di lahan yang sedang dikelola) memiliki nilai ekonomi yang tidak sebanding dengan biaya produksinya. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mengkritisi kegiatan *Food Estate* di Humbang Hasundutan terkait petani, pelaksanaannya, serta saprodinya.
3. Komisi IV DPR RI mengkritisi terkait status lahan di lokasi *Food Estate* Sumatera Utara, oleh karena itu Komisi IV DPR RI akan melakukan rapat antara dengan Kementerian Pertanian, Kementerian LHK dan ATR/BPN.
4. Komisi IV DPR RI mempertanyakan sejauhmana kontribusi perusahaan swasta/offtaker, oleh karena itu Komisi IV DPR RI akan melakukan rapat dengan perusahaan/offtaker *food estate*.
5. Komisi IV DPR RI meminta agar dilakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program *food estate* agar tidak mengalami

kegagalan dan tetap berkelanjutan, selain itu meminta agar dilakukan pendampingan dan penyuluhan secara intensif kepada petani.

6. Komisi IV DPR RI mengusulkan agar dilokasi *food estate dibangun* fasilitas umum dalam rentang jarak tertentu untuk mempermudah petani.

## I. PENUTUP

Demikian Hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI dalam rangka pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan *food estate* berbasis hortikultura di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan, usulan dan aspirasi yang telah disampaikan, baik dalam rapat baik Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian. Semoga kunjungan ini membawa manfaat dalam rangka melindungi masyarakat dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, Maret 2021

Ketua Tim,

Ttd.

H. Dedi Mulyadi, S.H.

A-294